

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DENGAN MENGUBAH CARA PANDANG PEMBANGUNAN EKONOMI KELAUTAN

Dr. Hamka, MA

Dosen STIA LAN Jakarta

Cokorda Bagus Alit Y, S.E.

Mahasiswa Program Magister Sumber Daya Aparatur STIA LAN Jakarta

Martinus Pn Jupriyono, S.S.

Mahasiswa Program Magister Sumber Daya Aparatur STIA LAN Jakarta

Abstract

Indonesia is a maritime country and the largest archipelago in the world, and before the colonial period of Indonesia through the triumph of the Kingdom of Srivijaya, the Majapahit Kingdom, and a number of Islamic sultanates were once a maritime country that was resilient, quite prosperous, and respected by the world community. But as a maritime nation and the largest archipelago in the world, whose territorial sea includes the EEZ covers 75 percent of the total area and consists of 17,504 islands, the achievement of marine economic development results is still far from the optimal potential of marine owned by Indonesia. Indonesia is still experiencing difficulties in utilizing its marine areas which are rich in fishery resources due to the Government's inadequacy in strengthening the national fishing fleet in order to enhance marine economic development so that it can be more beneficial for the public interest.

Keywords: *Management and utilization of the sea, land and sea development*

Abstrak

Indonesia merupakan Negara bahari dan kepulauan terbesar di dunia, dan sebelum masa penjajahan Indonesia melalui kejayaan Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Majapahit, dan sejumlah kesultanan Islam pernah menjadi Negara maritim yang tangguh, cukup makmur, dan disegani oleh masyarakat dunia. Namun sebagai Negara bahari dan kepulauan terbesar di dunia yang wilayah lautnya termasuk ZEE meliputi 75 persen total wilayah dan terdiri dari 17.504 pulau, pencapaian hasil pembangunan ekonomi kelautan masih jauh dari potensi optimal kelautan yang di miliki Indonesia. Indonesia masih mengalami kesulitan untuk memanfaatkan wilayah lautnya yang kaya dengan sumber daya perikanan yang disebabkan oleh kurang maksimalnya Pemerintah dalam memperkuat armada perikanan nasional guna meningkatkan pembangunan ekonomi kelautan sehingga lebih bias bermanfaat untuk kepentingan masyarakat.

Kata kunci: Negara bahari, pembangunan ekonomi kelautan

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara bahari dan kepulauan terbesar di dunia, dan sebelum masa penjajahan Indonesia melalui kejayaan Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Majapahit, dan sejumlah kesultanan Islam pernah menjadi Negara maritim yang tangguh, cukup makmur, dan disegani oleh masyarakat dunia. Namun sebagai Negara bahari dan kepulauan terbesar di dunia yang wilayah lautnya termasuk ZEE meliputi 75 persen total wilayah dan terdiri dari 17.504 pulau, pencapaian hasil pembangunan ekonomi kelautan masih jauh dari potensi optimal kelautan yang di miliki Indonesia. Indonesia masih mengalami kesulitan untuk memanfaatkan wilayah lautnya yang kaya dengan sumber daya perikanan yang disebabkan oleh kurang maksimalnya Pemerintah dalam memperkuat armada perikanan nasional guna meningkatkan pembangunan ekonomi kelautan sehingga lebih bias bermanfaat untuk kepentingan masyarakat.

Indonesia memiliki sekitar 8.090 desa pesisir di 300 Kabupaten dan Kota dimana bermukim sekitar 16,42 juta jiwa warga yang bermata pencarian sebagai nelayan,

pembudidaya ikan, pengolah, pemasar dan pedagang hasil perikanan. Mayoritas nelayan dan masyarakat pesisir masih terilit derita kemiskinan. Sementara gejala *overfishing*, kerusakan eko sistem pesisir (terumbu karang, utan mangrove, dan estuaria), dan pencemaran melanda sekitar 40 % wilayah pesisir laut juga berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi kelautan. Masyarakat nelayan sering dinilai lebih terbelakang daripada masyarakat perkotaan dalam hal derap pembangunan dalam arti seluas luasnya. Padahal mereka dapat mencukupi hidup keseharian mereka jika diatur dengan baik oleh Pemerintah.

Peran dan sumbangsih masyarakat pesisir akan memberi dampak signifikan bagi pembangunan secara keseluruhan. Sebab, pesatnya perkembangan wilayah pesisir dan sumber daya laut di Indonesia pada posisi strategis akan menghasilkan keuntungan ekonomi berupa devisa hasil ekspor. Kontribusi yang demikian akan terus berlanjut, apalagi terdapat berbagai aktifitas masyarakat yang masih belum sesuai dengan kemampuan dan daya dukung lingkungan, seperti kegiatan perikanan tangkap, budidaya perikanan. Berbagai upaya pemanfaatan harus dilakukan secara terencana dan tepat agar dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan terutam terakomodasinya kesejahteraan masyarakat pesisir.

Kontribusi kegiatan ekonomi berbasis kelautan masih kecil dibanding dengan potensi dan peranan sumber daya pesisir dan lautan yang sedemikian besarnya. Persoalannya adalah bagaimana memberdayakan masyarakat pesisir? Strategi apa yang harus dikerjakan untuk membuat masyarakat pesisir semakin berdaya?

KAJIAN LITERATUR

2.1. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

Berdasarkan kesepakatan umum di dunia bahwa wilayah pesisir adalah suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan. Dilihat dari garis pantai, maka wilayah pasir memiliki dua macam batas yaitu: batas yang sejajar garis pantai dan batas yang tegak lurus terhadap garis pantai. Menurut kesepakatan internasional terakhir, wilayah pesisir didefinisikan sebagai wilayah peralihan antara laut dan daratan, ke arah darat mencakup daerah yang masih terkena pengaruh percikan air laut atau pasang surut dan ke arah laut meliputi suatu wilayah pesisir adalah sesuai dengan batas laut yang terdapat dalam Peta Lingkungan Pantai Indonesia (PLPI) dengan skala 1: 50.000 yang telah diterbitkan oleh Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional (Bakorsurtanal). Sedangkan batas ke arah darat adalah mencakup batas administratif seluruh desa pantai yang termasuk ke dalam wilayah Pesisir.

Masyarakat pesisir didefinisikan sebagai kelompok orang yang tinggal di daerah pesisir dan sumber kehidupan perekonomiannya bergantung secara langsung pada pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisir. Definisi inipun bisa juga dikembangkan lebih jauh karena pada dasarnya banyak orang yang hidupnya bergantung pada sumberdaya laut. Mereka terdiri dari nelayan pemilik, buruh nelayan, pembudidaya ikan dan organisme laut lainnya, pedagang ikan, pengolah ikan, supplier faktor sarana produksi perikanan. Dalam bidang non perikanan, masyarakat pesisir bisa terdiri dari penjual jasa pariwisata, penjual jasa transportasi, serta kelompok masyarakat lainnya yang memanfaatkan sumber daya non hayati laut dan pesisir untuk menyokong kehidupannya.

Pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar (*bargaining*) masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan. Konsep pemberdayaan dimaknai dalam konteks menempatkan posisi berdiri masyarakat. Posisi masyarakat bukanlah obyek penerima manfaat (*beneficiaries*) yang tergantung pada pemberian dari pihak luar seperti pemerintah, melainkan dalam posisi sebagai subyek

(agen atau partisipan yang bertindak) yang berbuat secara mandiri. Berbuat secara mandiri bukan berarti lepas dari tanggungjawab negara. Pemberian layanan publik (kesehatan, pendidikan, perumahan, transportasi dan seterusnya) kepada masyarakat tentu merupakan tugas (kewajiban) negara secara *given*. Masyarakat yang mandiri sebagai partisipan berarti terbukanya ruang dan kapasitas mengembangkan potensi-kreasi, mengontrol lingkungan dan sumberdayanya sendiri, menyelesaikan masalah secara mandiri, dan ikut menentukan proses politik di ranah negara. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pemerintahan.

Permendagri RI Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat, dinyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya memandirikan masyarakat menuju kehidupan yang lebih sejahtera, adil, dan makmur.

2.2. Kemiskinan: Persoalan Utama Masyarakat Pesisir

Selayaknya masyarakat petani di pedesaan, maka masyarakat pesisir identik dengan nelayan. Nelayan adalah suatu fenomena sosial yang sampai saat ini masih merupakan tema yang sangat menarik untuk didiskusikan. Membicarakan nelayan hampir pasti isu yang selalu muncul adalah masyarakat yang marjinal, miskin dan menjadi sasaran eksploitasi penguasa baik secara ekonomi maupun politik.

Kemiskinan yang selalu menjadi “trade mark” bagi nelayan dalam beberapa hal dapat dibenarkan dengan beberapa fakta seperti kondisi pemukiman yang kumuh, tingkat pendapatan dan pendidikan yang rendah, rentannya mereka terhadap perubahan-perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang melanda, serta ketidakberdayaan mereka terhadap intervensi pemodal dan penguasa yang datang.

Kemiskinan yang merupakan indikator ketertinggalan masyarakat pesisir ini disebabkan paling tidak oleh tiga hal utama, yaitu (1) kemiskinan struktural, (2) kemiskinan super-struktural, dan (3) kemiskinan kultural.

Pertama, kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh pengaruh faktor atau variabel eksternal di luar individu. Variabel-variabel tersebut adalah struktur sosial ekonomi masyarakat, ketersediaan insentif atau disinsentif pembangunan, ketersediaan fasilitas pembangunan, ketersediaan teknologi, dan ketersediaan sumberdaya pembangunan khususnya sumberdaya alam. Hubungan antara variabel-variabel ini dengan kemiskinan umumnya bersifat terbalik. Artinya semakin tinggi intensitas, volume dan kualitas variabel-variabel ini maka kemiskinan semakin berkurang. Khusus untuk variabel struktur sosial ekonomi, hubungannya dengan kemiskinan lebih sulit ditentukan. Yang jelas bahwa keadaan sosial ekonomi masyarakat yang terjadi di sekitar atau di lingkup nelayan menentukan kemiskinan dan kesejahteraan mereka.

Kedua, kemiskinan super struktural. Kemiskinan super struktural adalah kemiskinan yang disebabkan karena variabel-variabel superstruktur tersebut diantaranya kebijakan fiskal, kebijakan moneter, ketersediaan hukum dan perundang-undangan, kebijakan pemerintah yang diimplementasikan dalam proyek dan program pembangunan. Kemiskinan super struktural ini sangat sulit diatasi bila saja tidak disertai keinginan dan kemauan secara tulus dari pemerintah untuk mengatasinya. Kesulitan tersebut juga disebabkan karena kompetisi antar sektor, antara daerah, serta antar institusi yang mengakibatkan ketimpangan dan kesenjangan pembangunan. Kemiskinan super struktural ini hanya bisa diatasi apabila pemerintah, baik tingkat pusat maupun daerah, memiliki komitmen khusus dalam bentuk tindakan-tindakan yang bias bagi kepentingan masyarakat miskin. Dengan kata lain *affirmative actions*, perlu dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun daerah.

Ketiga, kemiskinan kultural. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang disebabkan karena variabel-variabel yang melekat, inheren, dan menjadi gaya hidup tertentu. Akibatnya sulit untuk individu bersangkutan keluar dari kemiskinan itu karena tidak

disadari atau tidak diketahui oleh individu yang bersangkutan. Variabel-variabel penyebab kemiskinan kultural adalah tingkat pendidikan, pengetahuan, adat, budaya, kepercayaan, kesetiaan pada pandangan-pandangan tertentu, serta ketaatan pada panutan. Kemiskinan secara struktural ini sulit untuk diatasi. Umumnya pengaruh panutan (patron) baik yang bersifat formal, informal, maupun asli (*indigenous*) sangat menentukan keberhasilan upaya-upaya pengentasan kemiskinan kultural ini. Penelitian di beberapa negara Asia yang masyarakatnya terdiri dari beberapa golongan agama menunjukkan juga bahwa agama serta nilai-nilai kepercayaan masyarakat memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap status sosial ekonomi masyarakat dan keluarga.

Para pakar ekonomi sumberdaya melihat kemiskinan masyarakat pesisir, khususnya nelayan lebih banyak disebabkan karena faktor-faktor sosial ekonomi yang terkait karakteristik sumberdaya serta teknologi yang digunakan. Faktor-faktor yang dimaksud membuat nelayan tetap dalam kemiskinannya. Kepastian dan kekakuan pada aset perikanan (*fixity and rigidity of fishing assets*) adalah alasan utama kenapa nelayan tetap tinggal dan bergelut dengan kemiskinan. Pada saat produktivitas aset rendah, nelayan tidak mampu untuk mengalihfungsikan atau melikuidasi aset tersebut.

2.3. Pembangunan Ekonomi Kelautan

Kajian ekonomi kelautan masih bersifat mikro dan parsial lebih dominan menyangkut ekonomi sumber daya alam dan lingkungan. Dalam laporan “*National Ocean Economic Program*” yang di terbitkan di Amerika Serikat Kildow et al (2009) mendefinisikan ekonomi kelautan dan pesisir berbeda. Kildow menyatakan bahwa ekonomi pesisir sebagai aktivitas ekonomi yang berlangsung di sepanjang wilayah pesisir. Sementara ekonomi kelautan (*Ocean economic*) yaitu sebagai aktifitas ekonomi yang bergantung pada laut dan produk produknya. Ditambahkan juga bahwa ekonomi kelautan berasal dari lautan yang sumber dayanya menjadi input barang dan jasa secara langsung maupun tidak langsung dalam aktifitas ekonomi utamanya berupa : industri yang eksplisit berkaitan dengan aktivitas kelautan atau secara parsial berkaitan dengan kelautan yang berlokasi pada suatu perbatasan yang di tandai oleh garis pantai (*a shore-adjacent zip code*).

Ekonomi kelautan belum mendapatkan tempat dalam kebijakan pembangunan nasional di Indonesia karena pemikiran pembangunan ekonomi Indonesia lebih di dominasi cara berfikir kontinental ketimbang kelautan maupun maritim. Ekonomi kelautan belum mendapatkan tempat dalam kebijakan pembangunan nasional di Indonesia karena:

- 1) Berbagai kalangan berpendapat bahwa dengan memposisikan ekonomi kelautan sebagai basis pembangunan ekonomi nasional berimplikasi luas karena akan mengubah secara radikal pelbagai nomenklatur, kebijakan politik anggaran, dan peraturan perundangan di Indonesia.
- 2) Kalangan intelektual ekonom Indonesia, parlemen dan birokrat relatif kurang meleak soal-soal kelautan dan perikanan hingga kerap berfikir mengikuti aliran pemikiran ekonomi arus utama idiologi neo-liberalismenya ketimbang menyempal dan membangun gagasan-gagasan baru bersifat konstruktivisme.

Model pembangunan sebuah Negara dan pilihan demokrasi yang dianutnya amat berkorelasi positif dalam membangun kesejahteraan rakyatnya. Hubungannya dengan ekonomi kelautan yakni menyangkut pemanfaatan dan pengelolaan sumberdayanya bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Negara yang telah memilih model demokrasi (*free fight liberalism*), parlementer dengan demokrasi sosial maupun sistem komunisme telah mengetahui konsekuensinya masing-masing.

Damanhuri (2010) dalam bukunya yang berjudul “Ekonomi Politik dan Pembangunan. Teori, Kritik dan Solusi bagi Indonesia dan Negara Sedang

Berkembang” mengajukan empat model pembangunan dunia dengan model pilihan demokrasinya Model Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) ala Negara-negara Skandinavia (Swedia, Finlandia, Denmark serta Norwedia dan Negara-negara yang kekuasaannya diperintah oleh partai sosialis democrat seumpama Prancis, Spanyol, Jerman dan Inggris. Model ini dicirikan:

- a. Sistem pajak progresif dan jaminan sosial efektif
- b. Aktor swasta sebagai agen pertumbuhan yang efisien
- c. Serikat buruh amat menentukan berdampingan sistem demokrasi parlementer yang efektif hingga dibarengi partai oposisi yang menjamin berlangsungnya sistem *check and balanced*.

Di Negara-negara ini pemanfaatan Sumber Daya Alam terbukti mampu mensejahterakan rakyatnya sekaligus menyelamatkan lingkungan dari bahaya kerusakan ekologis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian yang menggunakan data yang dapat dihitung untuk menghasilkan penafsiran kuantitatif yang kuat (Pasolong, 2012:175). Penelitian kuantitatif adalah definisi, pengukuran data kuantitatif dan statistik objektif melalui perhitungan ilmiah berasal dari sampel orang-orang atau penduduk yang diminta menjawab atas sejumlah pertanyaan tentang survei untuk menentukan frekuensi dan persentase tanggapan mereka. Penelitian ini dalam pengumpulan datanya menggunakan metode survei dengan teknik observasi, dokumentasi, kepustakaan dan angket yang disebarakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perubahan Pola Pikir tentang Laut

Senin, 20 Oktober 2014 dalam pidato kenegaraan perdana di Gedung MPR/DPR, Presiden Jokowi mengatakan: “Kita telah lama memunggungi samudra, laut, selat dan teluk. Maka, mulai hari ini, kita kembalikan kejayaan nenek moyang sebagai pelaut pemberani. Menghadapi badai dan gelombang di atas kapal bernama Republik Indonesia”. Di bagian lain pidato tersebut, Presiden ke-7 RI itu juga menyampaikan, “Kepada para nelayan, buruh, tukang bakso, para pedagang asongan, sopir, akademisi, guru, TNI, pengusaha, dan para profesional. Saya menyerukan untuk bekerja keras, bergotong royong, karena inilah momen sejarah untuk kita bekerja bersama, untuk bekerja dan bekerja”.

Pidato Jokowi di atas cocok untuk diterapkan bagi para masyarakat nelayan yang mayoritas berada di garis marjinal. Pemecahan masalah kemiskinan memerlukan usaha menghilangkan tradisionalisme, fatalisme, karakter cepat puas dan ketidakberanian mengambil resiko. Konsekuensinya adalah diperlukan usaha penataran, pelatihan, ceramah, penyuluhan dan program khusus tentang pentingnya ekonomi kelautan. Untuk menanggulangi kemiskinan secara garis besar dikenal dua pendekatan yaitu, kebijaksanaan yang bersifat tidak langsung dan bersifat langsung. Pendekatan pertama melalui pembangunan ekonomi nasional yang berorientasi pasara yang sehat di tingkat petani/nelayan. Pendekatan yang kedua dapat berupa atau terkait dengan program Pemerintah secara sektoral seperti pendidikan, kesehatan, prasarana, dan bentuk bantuan langsung pada kelompok miskin.

Model pendampingan kelompok miskin pesisir mutlak dilakukan dalam memperbaiki budaya usaha, memotivasi keluarga dalam pengelolaan keuangan. Pemberdayaan masyarakat dengan pengembangan sumber ekonomi, peningkatan kapasitaas masyarakat, dan kelembagaan. Di samping itu kegiatan ekonomi di wilayah

pesisir didukung dengan mengatur sistem pasar dan manajemen pengelolaan sumberdaya perairan dan pantai.

Ekonomi kelautan dan pesisir sebagai suatu mindset baru pembangunan ekonomi di Indonesia semestinya membutuhkan kategorisasi yang jelas soal ruang lingkungannya. Secara geografis, lingkup ekonomi kelautan dan pesisir Indonesia memiliki ciri khas secara geografis yakni memiliki keragaman sumber daya kelautan yang amat tinggi serta cara pandang untuk mengelola dan memanfaatkan laut dan sumber dayanya di permukaan, badan air hingga bawah dasar laut untuk kepentingan sebesar-besarnya kemakmuran rakyatnya.

Peran Penting Regulasi Pemerintah di era Pasar Bebas

Sumberdaya kelautan dan perikanan Indonesia mempunyai peranan penting bagi pembangunan nasional baik secara aspek ekonomi, sosial, keamanan dan ekologi. Dengan total luas laut Indonesia sekitar 5,8 juta km², yang terdiri dari 2,3 juta km² perairan kelautan, 0,8 juta km² perairan teritorial, dan 2,7 km² perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, maka posisi dan letak kepulauan Indonesia yang bersifat archipelagic, yang terdiri dari 17.504 pulau, menjadi sangat penting dalam sistem perdagangan dan penyedia bahan baku bagi masyarakat nasional dan internasional.

Selain itu juga letak wilayah kepulauan sangat memungkinkan bagi bangsa Indonesia untuk membangun perekonomian yang didasarkan pada basis sumberdaya kelautan dan perikanan. Namun demikian secara umum kinerja pembangunan kelautan dan perikanan sampai saat ini belum menunjukkan adanya terobosan baru dalam melakukan langkah optimalisasi sumberdaya kelautan dan perikanan untuk kinerja ekonomi nasional, melindungi kelestarian sumberdaya ikan dan kesejahteraan nelayan serta pembudidaya ikan. Selain itu juga banyak program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan yang tidak memiliki manajemen yang baik, terkesan hanya sekedar pelaksanaan proyek saja sehingga banyak yang tidak terpakai dan terbengkalai. Kebijakan ekonomi pembangunan kelautan dan perikanan yang berkembang sejak awal reformasi sampai saat ini hanyalah kebijakan-kebijakan yang terus berulang, padahal sudah terbukti kebijakan tersebut telah mengalami kegagalan. Kebijakan-kebijakan tersebut hanya berganti nama setiap periode pemerintahan. Atau dengan kata lain kebijakan kelautan dan perikanan tersebut merupakan kebijakan reinkarnasi dari kebijakan periode pemerintahan sebelumnya.

Indonesia sebagai bagian ASEAN memberlakukan perdagangan bebas dengan China melalui (*Free-Trade Area/FTA* ASEAN-China) mulai tahun 2010, walaupun penandatanganan FTA tersebut sudah dilakukan sejak tahun 2002. FTA ASEAN-CHINA tidak hanya akan mengancam konsumsi masyarakat, melainkan sektor riil perikanan.

Menghapus sistem tarif (pajak ekspor dan impor) dan memberlakukan non-tarif jadi instrument pokok perdagangan bebas (*free trade area*). Di sektor perikanan Cina akan menggilas Indonesia akibat kalah bersaing. Indikatornya pertama, Laporan FAO 2008 menempatkan Cina sebagai Negara produksi perikanan terbesar yang bersumber dari laut dan perairan umum 17,1 juta ton. Kedua, Cina juga sebagai produsen perikanan budidaya (*aquaculture*) terbesar dunia. Capaiannya tahun 2004 sebesar 30.614.968 ton meningkat 34.429.122 tahun 2006 (naik 6,05%). Superioritas Cina dalam perikanan dunia amat ekspansif. Cina membidik bekerjasama dengan ASEAN utamanya Indonesia karena penduduknya berjumlah sekitar 230 juta sebagai pasar potensial perikanan dan produknya. Hal tersebut berdampak :

- 1) Usaha perikanan rakyat (penangkapan dan budidaya) pasti akan kolaps karena tidak mampu menyaingi serbuan ikan dan produk ikan dari Cina
- 2) Berlakunya FTA ASEAN-China 2010, otomatis investasi skala besar perikanan akan masuk Indonesia.

3) Liberalisasi perikanan dalam skala bisnis besar berpotensi meningkatkan emisi karbon.

Mencermati fakta dan dampaknya, kebijakan pemerintah menekan perjanjian FTA ASEAN-China dikhawatirkan akan memperburuk industri perikanan nasional, perikanan rakyat (nelayan dan pembudidaya ikan) dan memproduksi kemiskinan hingga pengangguran baru.

Potensi Sumber Daya Hayati dan kondisi Nelayan saat ini

Pemanasan global akan mendorong migrasi ikan dari perairan tropis ke sub-tropis yang memosisikan negara lain karena surplus tangkapan ikan.

Hasil penelitian Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan dan Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim di pulau Tarakan menunjukkan adanya dampak perubahan iklim:

- 1) Musim penangkapan ikan di wilayah Tarakan sudah sulit diprediksi setiap tahunnya.
- 2) Angin kencang dan badai yang melanda wilayah pesisir Tarakan.
- 3) Dalam periode waktu antara tahun 1980-1990 terjadi kekeruhan air laut secara alamiah.
- 4) Telah terjadi perubahan lokasi fishing ground ikan dan hasil tangkapan menurun sejak 5 tahun terakhir.

Kemiskinan Masyarakat Pesisir dapat di buktikan dari Hasil penelitian bahwa di kabupaten Sukabumi dan Karawang kawasan pesisir lebih tertinggal ketimbang non pesisir.

Penyebab kemiskinan di wilayah pesisir antara lain:

- 1) Kuatnya tekanan – tekanan struktural yang bersumber dari kebijakan pemerintah Indonesia dalam membangun sub-sektor perikanan.
- 2) Ketergantungan yang berbentuk *patron client* antara pemilik faktor produksi dan buruh nelayan.
- 3) Terjadinya *over* eksploitasi terhadap sumberdaya perikanan terhadap akibat modernisasi yang tak terkendali.
- 4) Terjadinya penyerobotan wilayah perikanan tradisional yang dilakukan oleh perusahaan perikanan modern yang sejatinya menjadi daerah beroperasinya nelayan tradisional.

Nelayan buruh dalam sistem kelas sosial masyarakat pesisir tergolong marjinal dan tertidas secara ekonomi. Struktur sosial nelayan khususnya nelayan tradisional dan nelayan buruh, biasanya amat lemah di depan juragan. Mereka bahkan menganggap juragan mendekati mesianis akibat keberadaannya dapat menjadi juru selamat saat mereka tidak memiliki uang. Nelayan buruh bukanlah orang miskin, mereka hanya sebagian warga bangsa yang tidak berdaya akibat kebijakan ekonomi politik negara yang menganut mazhab produktif dan eksploitatif atas sumber daya kelautan dan perikanan yang berlangsung hingga kini. Sebagai negara yang menghormati hak asasi manusia, Buruh nelayan dan nelayan semestinya mendapatkan:

- 1) Asuransi berupa asuransi kematian, kecelakaan kerja, kesehatan, dan pendidikan anak – anak.
- 2) Jaminan perlindungan hukum bagi nelayan buruh/tradisional yang menangkap ikan di perbatasan wilayah maritim.

Peran Besar Pemerintah dalam Kebijakan sektor Kelautan

Strategi pembangunan ekonomi kelautan di Indonesia harus diubah dengan merubah cara pandang membangun dengan memperhatikan semua potensi yang di miliki oleh Indonesia. Salah satunya adalah pembangunan perikanan harus didasarkan pada akurasi data statistik perikanan dan harus menggunakan metode baku yang handal untuk di jadikan panduan dinas - dinas di daerah setempat dalam pengumpulan data

perikanan. Kebijakan pembangunan perikanan pada masa yang akan datang hendaknya didasarkan pada landasan pemahaman yang benar tentang peta permasalahan pembangunan perikanan itu sendiri, yaitu mulai dari permasalahan mikro sampai pada permasalahan di tingkat makro yang mengarah pada pemberdayaan masyarakat nelayan. Permasalahan mikro yang dimaksudkan adalah persoalan internal masyarakat nelayan dan petani ikan menyangkut aspek sosial budaya seperti pendidikan, mentalitas, dan sebagainya. Aspek ini yang mempengaruhi sifat dan karakteristik masyarakat nelayan dan petani ikan. Sifat dan karakteristik tersebut dipengaruhi oleh jenis kegiatan usaha seperti usaha perikanan tangkap, usaha perikanan tambak, dan usaha pengolahan hasil perikanan. Kelompok masyarakat ini memiliki sifat unik berkaitan dengan usaha yang dilakukannya. Karena usaha perikanan sangat bergantung pada musim, harga dan pasar maka sebagian besar karakter masyarakat pesisir (khususnya nelayan dan petani ikan) tergantung pada faktor-faktor tersebut yaitu;

1) Kehidupan masyarakat nelayan dan petani ikan menjadi amat tergantung pada kondisi lingkungan atau rentan pada kerusakan khususnya pencemaran atau degradasi kualitas lingkungan.

2) Kehidupan masyarakat nelayan sangat tergantung pada musim. Ketergantungan terhadap musim ini akan sangat besar dirasakan oleh nelayan-nelayan kecil.

3) Persoalan lain dari kelompok masyarakat nelayan adalah ketergantungan terhadap pasar. Hal ini disebabkan komoditas yang dihasilkan harus segera dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau membusuk sebelum laku di jual.

Karakteristik ini mempunyai implikasi yang sangat penting yaitu masyarakat nelayan sangat peka terhadap fluktuasi harga. Perubahan harga sekecil apapun sangat mempengaruhi kondisi sosial masyarakat nelayan. Namun demikian di balik ketiga persoalan tersebut sebenarnya ada persoalan yang lebih mendasar yaitu persoalan sosial dalam konteks makro menyangkut ketergantungan sosial (patron client). Karena faktor kelemahan yang dimiliki sebagian besar nelayan (nelayan kecil dan pandega), mereka tidak bisa menghindari adanya sistem sosial yang tanpa atau disadari menjeratnya ke dalam "lingkaran setan" kemiskinan.

Sistem sosial ini sudah begitu melembaga pada masyarakat nelayan. Persoalan inilah yang seharusnya menjadi fokus perhatian pemerintah dalam melakukan pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan. Semestinya ada instrumen kebijakan yang mampu secara efektif mengurangi (kalau tidak dapat menghilangkan) sistem sosial yang tidak memungkinkan nelayan kecil keluar dari lingkaran kemiskinan. Seperti menciptakan skenario baru model-model pembiayaan untuk pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan melalui penguatan kelembagaan dan kemampuan bisnis masyarakat pesisir menjadi sangat mendesak untuk diimplementasikan.

PENUTUP

Kesimpulan

Pemerintah sebagai regulator harus mengubah cara pandang dalam mengelola laut dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya sehingga kebijakan yang di tentukan dapat menggerakkan bisnis sesuai dengan kekuatan yang berperilaku wajar. Skenario baru model model pembiayaan harus diciptakan untuk pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan melalui penguatan kelembagaan dan kemampuan bisnis masyarakat pesisir yang dapat meningkatkan kesejahteraan.

DAFTAR PUSTAKA

Subri, Mulyadi. 2005. *Ekonomi Kelautan*. Jakarta: PT.Rajagrafindo

<http://eafm-indonesia.net/public/files/penelitian/5ae09-POTENSI,-PRODUKSI-SUMBERDAYA-IKAN-DI-PERAIRAN-LAUT-INDONESIA-DAN-PERMASALAHANNYA.pdf> [Diakses tanggal 25 September 2014]

Kusumastanto, Tridoyo. 2012. *Pengembangan Sumberdaya Kelautan Dalam Memperkokoh Perekonomian Nasional Abad 21*.
<http://www.lfip.org/english/pdf/baliseminar/pemberdayaan%20sumber%20daya%20kelautan%20-%20tridiyo%20kusumastanto.pdf>